LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

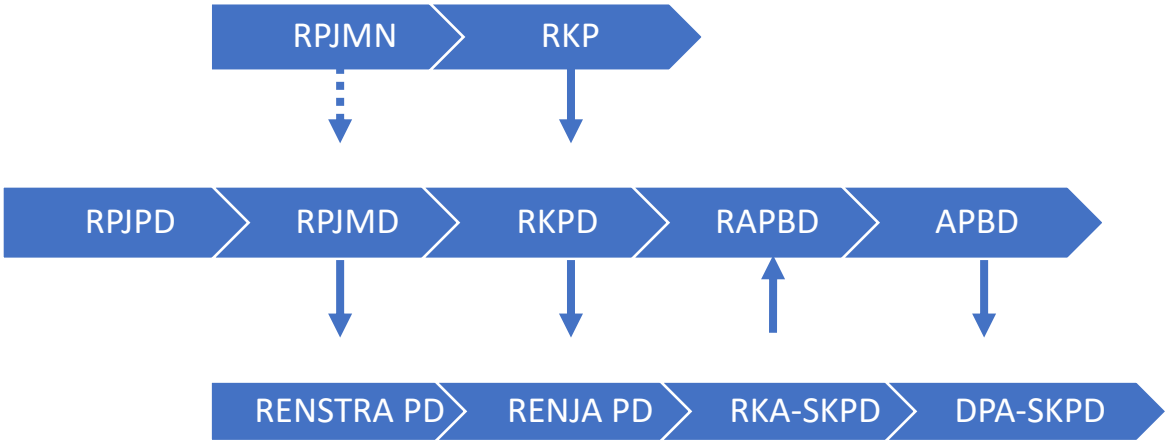
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran




Keterangan:
- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerahdigunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3 (ketiga) periode tahun 2026; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

# BAB II

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2026 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
(Target Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029)

| Kode rekening | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2026 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2023) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024) | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024 | Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025) | Tingkat capaian realisasi target renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10 | 11=(10/4) |
| 1 | | | | **Urusan Wajib** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**<br><br>**(Rata-rata realisasi capaian Kegiatan)** | **83,25** | **80,05** | **83,50** | **78,50** | **94,01** | **83,00** | **0** | **0** |
| 1 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah | 7 jenis | 3 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 100 % | 5 jenis | 3 jenis | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | -Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN<br>-Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 100% | 3 jenis | 3 jenis | 100% |
| 1 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 1 jenis | 0 jenis | 1 jenis | 1 jenis | 100% | 1 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah sub Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan | 0 jenis | 0 jenis | 0 jenis | 0 | 0 | 1 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat | Tersedianya Peralatan dan | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 100 % | 6 jenis | 0 jenis | **0%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Daerah | Perlengkapan Pelayanan Perkantoran<br>Tersusunnya Laporan Penatausahaan Perkantoran | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Tersedianya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2 jenis | 1 jenis | 3 jenis | 3 jenis | 100% | 1 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Pelayanan Perkantoran | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 100% | 2 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Perawatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 5 jenis | 4 jenis | 5 jenis | 5 jenis | 100% | 5 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 05 | 03 | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **-Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Informasi dan Edukasi<br>-Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana<br>-Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>-Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan sesuai Renaksi** | **0,25%<br>0,689%<br>90%<br>72,5%** | | **83,33** | **83,00** | **99,60** | **0,23%<br>0,686%<br>90%<br>71,5%** | | **0%** |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | -Jumlah layanan informasi dengan tatap muka yang dilakukan<br>- Jumlah layanan informasi dengan media yang dilakukan<br>- Jumlah dokumen yang disusun | 1 jenis | 1 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 100 % | 1 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | -Jumlah dokumen yang disusun<br>- Jumlah personil PB yang ditingkatkan kapasitasnya<br>-Persentase peralatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang terpenuhi | 6 jenis | 4 jenis | 6 jenis | 6 jenis | 100 % | 6 jenis | 0 jenis | **0%** |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | - Persentase peralatan penyelamatan dan evakuasi bencana yang terpenuhi | 4 jenis | 3 jenis | 4 jenis | 3 jenis | 75 % | 3 jenis | 0 jenis | **0%** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | - Jumlah Logistik kebencanaan yang tersedia<br>- Persentase kejadian bencana yang ditangani | | | | | | | | |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | -Jumlah Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana yang dilakukan<br>-Jumlah dokumen yang disusun | 4 jenis | - | 4 jenis | 4 jenis | 100 % | 4 jenis | 0 jenis | **0%** |

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

| No. | Interval Nilai | Predikat |
|---|---|---|
| 1. | **≥ 91%** | Sangat Tinggi |
| 2. | **76% ≤ 90%** | Tinggi |
| 3. | **66% ≤ 75%** | Sedang |
| 4. | **51% ≤ 65%** | Rendah |
| 5. | **≤ 50%** | Sangat Rendah |

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

| **Program Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja** | **Predikat** |
|---|---|---|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 80,05 | Tinggi |
| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
| Sudah berjalannya komitmen pelayanan administrasi dengan baik sehingga realisasi indikator kinerja berupa Nilai SAKIP tahun 2023 yaitu 80,05 dengan kategori Nilai A | Target renstra belum tercapai | Mengalokasikan anggaran sesuai perencanaan dengan memperhatikan pelayanan administrasi umum sesuai rencana aksi yang tepat waktu |
| **Program Perangkat Daerah** | **Capaian Kinerja** | **Predikat** |
| Program Penanggulangan Bencana | 83,00 | Tinggi |

| Faktor Penyebab | Implikasi Terhadap Target Renstra PD | Kebijakan Yang Diambil |
|---|---|---|
| Komitmen terhadap standar pelayanan minimal sudah dilaksanakan sehingga realisasi indikator kinerja berupa Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tahun 2024 adalah 0,61 dari target renstra 0,58 sehingga capaiannya 105,17% | Target renstra terlampaui | Fokus penerapan SPM dan pelaksanaan paradigma baru sesuai arahan wakil presiden dalam Rakornas PB 25 April 2024 bahwa kunci utama dalam mengurangi resiko terjadi bencana yaitu pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang perlu ditingkatkan |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan IV

Kemudian dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah perlu didukung data yang relevan sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

| **No.** | **Tujuan/Sasaran** | **Indikator** | **Kinerja s/d tribulan IV 2024** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** |
| 1. | Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0,58 | 0,63 | 108,62 |
| 2. | Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana yang meliputi : | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | - Mitigasi Dan Kesiapsiagaan | Persentase desa tangguh bencana | 81 | 84 | 103.70 |
| | - Penanganan Darurat | Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani | 90 | 52 | 142,22 |
| | - Penanganan Pasca Bencana | Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA | 78 | 100 | 128,20 |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian Kinerja (%) | Tercapai/Tidak Tercapai |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Meningkatnya ketangguhan Penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana | Persentase desa tangguh bencana | 103.70 | Tercapai |
| | | Rata-rata kejadian bencana yang direspon Dan ditangani | 142.22 | Tercapai |
| | | Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA | 128.20 | Tercapai |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisa keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja utama pada masing-masing sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, antara lain :

a. Indikator kinerja persentase desa tangguh bencana target kinerja 81%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya pelatihan pembentukan desa tangguh bencana sampai dengan tahun 2024 sejumlah 84 desa. Maka, capaian kinerja dari persentase desa tangguh bencana yaitu 84% pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
b. Indikator kinerja rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani dengan target 90 menit. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya penanganan bencana pada satu tahun periode terhitung dari data cakupan kejadian bencana yang ditangani oleh tim BPBD selama tahun 2024 terdapat sejumlah 62 kejadian bencana dengan realisasi rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani 52 menit. Maka, capaian kinerja dari rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani yaitu 142.22% pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
c. Indikator kinerja Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA dengan target 78%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana, sampai dengan akhir tahun 2024 sudah terlaksana sebanyak 7 infrastruktur dari target 7 sarana/prasarana infrastruktur yang ditetapkan, atau terealisasi 100%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2026

| SASARAN | INDIKATOR | KINERJA | | |
|---|---|---|---|---|
| | SASARAN | **TARGET** | **REALISASI** | CAPAIAN |
| **Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi** | Persentase desa tangguh bencana | 81% | 84% | **103,70%** |
| | Rata-rata kejadian bencana yang direspon dan | 90 menit | 52 menit | **142.22 %** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **dan** | ditangani | | | |
| **kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana** | Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA | 78% | 78% | **100%** |
| Jumlah rata-rata capaian kinerja | | | | 115.30% |

a. Indikator kinerja persentase desa tangguh bencana target kinerja 81%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya pelatihan pembentukan desa tangguh bencana sampai dengan tahun 2024 sejumlah 84 desa. Maka, capaian kinerja dari persentase desa tangguh bencana yaitu 84% pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
b. Indikator kinerja rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani dengan target 90 menit. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya penanganan bencana pada satu tahun periode terhitung dari data cakupan kejadian bencana yang ditangani oleh tim BPBD selama tahun 2024 terdapat sejumlah 62 kejadian bencana dengan realisasi rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani 52 menit. Maka, capaian kinerja dari rata-rata kejadian bencana yang direspon dan ditangani yaitu 142.22% pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
c. Indikator kinerja Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA dengan target 78%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2024

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan | Persentase desa tangguh bencana | 81 | 84 | 103,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Masyarakat | | | | |
| | | Persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai | 80 | 100 | 125 |
| | | Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/*Early Warning System* (EWS) | 75 | 30 | 40 |
| | | Persentase korban selamat akibat bencana | 70 | 84 | 120 |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana | 80 | 46,64 | 58,30 |
| | | Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA | 78 | 78 | 100 |

Dari tabel diatas, maka dapat dianalisa keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja kunci pada masing-masing indikator, antara lain :

a. Indikator kinerja persentase desa tangguh bencana target kinerja 81%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya pelatihan pembentukan desa tangguh bencana sampai dengan tahun 2024 sejumlah 84 desa. Maka, capaian kinerja dari persentase desa tangguh bencana yaitu 103,70% pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
b. Indikator kinerja persentase pemenuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai target kinerja 80%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya jumlah peralatan untuk penanggulangan bencana yang dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2024 sejumlah 599 unit. Maka, capaian kinerja yaitu 125 % pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
c. Indikator kinerja Tingkat efektifitas Sistem Peringatan Dini/Early Warning System (EWS) target kinerja 75%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya jumlah EWS yang dalam kondisi

baik sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2 unit dari 5 yang ada. Maka, capaian kinerja yaitu 40 % pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan belum tercapai.

d. Indikator kinerja Persentase korban selamat akibat bencana target kinerja 70%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya jumlah korban yang berhasil ditolong sejumlah 12 orang dari target 10 orang. Maka, capaian kinerja yaitu 120 % pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan tercapai.
e. Indikator kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana target kinerja 80%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu adanya jumlah korban yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar seperti sembako dan makanan siap saji sejumlah 583 orang dari target 1000 orang. Maka, capaian kinerja yaitu 58,30 % pada batas akhir tahun 2024 dan dinyatakan belum tercapai.
f. Indikator kinerja Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA dengan target 78%. Untuk pencapaian kinerja pada sasaran tersebut yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberian bantuan stimulan untuk rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana, sampai dengan akhir tahun 2024 sudah terlaksana sebanyak 7 infrastruktur dari target 7 sarana/prasarana infrastruktur yang ditetapkan, atau terealisasi 78%.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

| No. | Indikator SPM | Target Renstra | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2026 | |
| | Sub Urusan Bencana | | | | | | | | BPBD |
| 1. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana adalah 1.144.508 jiwa dan semuanya telah terfasilitasi informasi bencana dari media online dan broadcast rutin termasuk yang offline berupa pemasangan rambu dan jalur evakuasi serta pamflet/brosur informasi kebencanaan |
| 2. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | Peningkatan kapasitas bagi aparatur dan warga untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| 3. | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | Semua warga berhak untuk mendapatkan pelayanan pertolongan dan penyelamatan bila terjadi bencana |

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

- Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Bencana
- Memberikan pelatihan untuk penanganan bencana kepada anggota TRC atau Relawan dan tersertifikasi
- Menyediakan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana
- Mendorong instansi terkait untuk terlaksananya amanat Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang di hadapai dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

- Perlu adanya pengkajian atas pengurangan risiko bencana ke dalam program kerja perangkat daerah
- Belum optimalnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten
- Penanganan tanggap darurat belum optimal
- Kurangnya tenaga Trainer/Fasilitator untuk pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana

2.3.3. Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-4 serta sasaran strategis daerah "Meningkatkan ketangguhan penanggulangan bencana"

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Pengumpulan Data Berkala, terhadap :
   a. Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
   b. Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan
   c. Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yang masih dibutuhkan
2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, dengan :
   a. Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
   b. Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar
   a. RPJMD dan RKPD
   b. Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar
   a. Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
   b. Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan

memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

### 2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang teridentifikasi saat ini dalam pelaksanaan program BPBD Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

a. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam;
b. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam;
c. Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana, antaran lain : Banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta bencana yang timbul akibat kegagalan teknologi;
d. Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih perlu terus ditingkatkan;
e. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, tidak adanya aplikasi untuk penunjang pengelolaan data untuk membantu dan mempercepat kinerja kegiatan dan pelaporan penanganan bencana;
f. Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sarana dan prasarana berbasis teknologi;

2.3.5. Isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

BPBD berkewajiban memenuhi pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah kabupaten/kota pada sub urusan bencana yang terdiri atas:

a. Pelayanan informasi rawan bencana, dengan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang rawan bencana pada masyarakat terutama di desa rawan bencana.
b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan melakukan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana.
c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan melakukan identifikasi kebutuhan sarana prasarana untuk penanganan bencana yang membutuhkan komitmen khusus dari Pemerintah Daerah untuk dialokasikan penganggarannya.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik”.**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

| No. | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisi Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **84,00** | **4.604.382.630** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | | **Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **83,25** | **4.198.772.592** | |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun** | **5 jenis** | **28.342.000** | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan** | **14 dokumen** | **34.436.000** | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 7 dokumen | 5.399.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 4 dokumen | 6.652.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | BPBD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.521.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | BPBD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.470.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | BPBD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.521.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | BPBD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.386.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPBD | Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu | 3 dokumen | 9.938.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | BPBD | Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu | 4 dokumen | 12.496.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu | 6 dokumen | 9.963.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | BPBD | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu | 4 dokumen | 12.432.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun** | **3 jenis** | 3.122.478.900 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**<br><br>**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN** | **17 Laporan**<br><br>**17 Orang** | **8.400.000**<br><br>**3.123.075.000** | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPBD | Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | 18 orang/bulan | 3.111.979.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | BPBD | Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | 17 orang/bulan | 3.123.075.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BPBD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu | 1 dokumen | 3.500.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | BPBD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu | 1 laporan | 3.040.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | BPBD | Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu | 12 dokumen | 6.999.900 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | BPBD | Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu | 16 laporan | 5.360.000 | |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | **1 Jenis** | **12.500.000** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun** | **12 Laporan** | **12.500.000** | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 12.500.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | BPBD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12.500.000 | |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Dokumen Umum Perangkat Daerah yang disusun** | **6 jenis** | 267.530.730 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan**<br><br>**Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun** | **19 Paket**<br><br>**283 Laporan** | **73.634.925**<br><br>**220.526.200** | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BPBD | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 4 jenis | 7.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BPBD | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 5.673.825 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik | BPBD | Jumlah paket bahan logistik kantor yang | 2 jenis | 32.120.400 | Penyediaan Bahan Logistik | BPBD | Jumlah paket logistik | 2 Paket | 59.727.600 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kantor | | disediakan | | | Kantor | | kantor yang disediakan | | | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | BPBD | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 jenis | 6.998.480 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | BPBD | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 paket | 8.233.500 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BPBD | Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 3 jenis | 6.400.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | BPBD | Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 3 dokumen | 6.000.000 | |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | BPBD | Jumlah laporan fasilitasi tamu | 2 jenis | 15.321.250 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | BPBD | Jumlah laporan fasilitasi tamu | 100 laporan | 20.280.200 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BPBD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 11 bulan<br>180 kali | 197.691.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | BPBD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 180 laporan | 194.246.000 | |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **BPBD** | **Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan** | **2 jenis** | **608.000.000** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan** | **100 Unit** | **92.656.517** | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | 8 jenis | 508.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | 100 Unit | 92.656.517 | |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **BPBD** | **Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia** | 2 jenis | **92.000.000** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun** | **1712 Laporan** | **103.000.000** | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BPBD | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1800 surat | 2.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | BPBD | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1700 surat | 2.400.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BPBD | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 23000 Kwh, 50Mbps | 90.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | BPBD | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 100.600.000 | |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **BPBD** | **Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan** | **4 jenis** | **383.531.000** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **BPBD** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik** | **92 Unit** | **530.543.950** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BPBD | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 26 unit | 325.000.000 | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | BPBD | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 29 unit | 249.880.000 | |
| | Pemeliharaan Mebel | BPBD | Jumlah mebel yang dipelihara | 8 jenis | 9.000.000 | Pemeliharaan Mebel | BPBD | Jumlah mebel yang dipelihara | 30 unit | 16.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 12 jenis | 29.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | BPBD | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 20 unit | 42.252.100 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 484 $m^2$ | 15.531.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit | 212.411.850 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 12 Unit | 5.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | BPBD | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 unit | 10.000.000 | |
| 2 | **Program Penanggulangan Bencana** | **BPBD** | **Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)** | **100%** | **2.785.798.700** | **Program Penanggulangan Bencana** | **BPBD** | **-Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Informasi dan Edukasi**<br>**-Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**<br>**-Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**<br>**-Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang** | **83,33** | **3.330.446.250** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **dilakukan sesuai Renaksi** | | | |
| | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **BPBD** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | **1.103.902 jiwa* (Jumlah warga di 20 kecamatan )**<br>***Nganjuk Dalam Angka 2021** | **157.000.000** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **BPBD** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | **1 jenis** | **87.534.500** | |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | BPBD | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 450 orang | 157.000.000 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | BPBD | Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 150 orang | 87.534.500 | |
| | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **BPBD** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **Warga di 20 kecamatan** | **2.049.053.700** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **BPBD** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **7 jenis** | **2.187.445.050** | |
| | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah desa rawan bencana tempat dilakukan mitigasi struktural | 10 desa | 35.253.300 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 kegiatan | 68.311.150 | |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan | BPBD | Jumlah Peralatan Penyelamatan diri bagi | 10 lokasi | 62.250.000 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan | BPBD | Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan | 120 unit | 57.533.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas | | | Kesiapsiagaan terhadap Bencana | | Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD | Jumlah gelar apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan | 1 kegiatan | 96.286.900 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | BPBD | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 600 orang | 198.807.600 | |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | BPBD | Jumlah lokasi kegiatan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan | 10 desa | 90.000.000 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | BPBD | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 10 kawasan | 90.000.000 | |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah tenaga harian lepas yang menangani kebencanaan | 38 orang | 1.300.550.000 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 35 orang | 1.338.981.000 | |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan | 1 dokumen | 300.000.000 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan | 1 dokumen | 326.822.500 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | | | sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | | | |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah kegiatan pelatihan yang diadakan | 300 orang | 240.000.000 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 5 kawasan | 196.989.800 | |
| | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **BPBD** | **Persentase penanganan tanggap darurat** | **100%** | **329.958.500** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **BPBD** | **Persentase penanganan tanggap darurat** | **100%** | **483.893.850** | |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | SK penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat | 100 persen | 154.355.000 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 25 Dokumen | 180.854.500 | |
| | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana | 100 persen | 40.532.000 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 orang | 58.889.350 | |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 35 orang | - | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 35 orang | 99.9112.500 | |
| | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 5 jenis | 135.071.500 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 500 orang | 244.150.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **BPBD** | **Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan** | **4 jenis** | **194.500.000** | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **BPBD** | **Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan** | **3 jenis** | **571.572.850** | |
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana | 2 kegiatan | 78.000.000 | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 2 dokumen | 90.037.500 | |
| | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 100 persen | 70.000.000 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 5 kegiatan | 435.093.350 | |
| | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah kegiatan forum PRB | 1 dokumen | 46.500.000 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | BPBD | Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah | 2 dokumen | 46.442.000 | |

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

| No. | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NIHIL

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2026

# BAB III

# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk adalah "**Meningkatnya Ketangguhan dalam Penanggulangan Bencana**", adapun sasaran yang akan dicapai adalah **"Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan, Meningkatnya kualitas penanganan bencana serta Meningkatnya pemulihan pascabencana"**, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

| Tujuan Perangkat Daerah | Indikator Kinerja | Target Tahun 2026 |
|---|---|---|
| Meningkatkannya ketangguhan dalam penanggulangan bencana | Indeks Ketahanan Daerah | 0,6320 |
| **Sasaran Perangkat Daerah** | **Indikator Kinerja** | **Target Tahun 2026** |
| Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan | Persentase desa tangguh bencana | 65,3 |
| Meningkatnya kualitas penanganan bencana | Rata-rata waktu respon penanganan bencana | 48 |
| Meningkatnya pemulihan pascabencana | Indeks pemulihan pascabencana | 71,5 |

## 3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

### 3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
4. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
6. Peningkatan kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

### 3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun yang terdiri 3 (tiga) layanan dasar dengan target sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana

| No. | Jenis Pelayanan Dasar | Target |
|---|---|---|
| 1. | Pelayanan informasi rawan bencana | 100% |
| 2. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% |
| 3. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% |

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

### 3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program,

kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

**#TABEL PRINT OUT SIPD-RI: MENU RENJA PD TAHUN 2026**

# BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan BPBD dalam melaksanakan sub urusan bencana.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

| No. | Prioritas Daerah | Alokasi(2026) |
|---|---|---|
| 1 | Program Penanggulagan Bencana | 3.463.007.050 |

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target (2026) | Alokasi (2026) |
|---|---|---|---|---|
| | - Meningkatnya mitigasi dan kesiapsiagaan | Persentase desa tangguh bencana | 65,3 | 2.444.107.350 |
| | - Meningkatnya kualitas penanganan bencana | Rata-rata waktu respon penanganan bencana | 48 | 583.806.350 |
| | - Meningkatnya pemulihan pascabencana | Indeks pemulihan pascabencana | 71,5 | 435.093.350 |

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|
| | | Uraian (Output) | Target | |
| **1** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **84,00** | **4.300.012.592,40** |
| | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan | 14 dokumen | 34.436.000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu | 4 dokumen | 6.652.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1.470.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dokumen | 1.386.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu | 4 dokumen | 12.496.000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu | 4 dokumen | 12.432.000 |
| | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun**<br><br>**Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN** | **17 Laporan**<br><br>**20 Orang** | **8.400.000**<br><br>**3.123.075.000** |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN | 17 orang/bulan | 3.123.075.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu | 1 laporan | 3.040.000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu | 16 laporan | 5.360.000 |
| | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD** | **12 Laporan** | **12.500.000** |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan | 12.500.000 |
| | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan**<br><br>**Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun** | **19 Paket**<br><br>**283 Laporan** | **79.634.925**<br><br>**249.106.200** |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 Paket | 5.673.825 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah paket logistik kantor yang disediakan | 2 Paket | 59.727.600 |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 7 paket | 8.233.500 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan | 3 dokumen | 6.000.000 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi tamu | 100 laporan | 28.860.200 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 180 laporan | 220.246.000 |
| | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan** | **100 Unit** | **92.656.517** |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan | 100 Unit | 92.656.517 |
| | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun** | **1712 Laporan** | **169.660.000** |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 1700 surat | 2.400.000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan | 100.600.000 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 66.460.000 |
| | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan** | **Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik** | **92 Unit** | **530.543.950** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Daerah** | | | |
| | Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 29 unit | 249.880.000 |
| | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang dipelihara | 30 unit | 16.000.000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara | 20 unit | 42.252.100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 3 unit | 212.411.850 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 unit | 10.000.000 |
| 2 | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)** | **83,33** | **3.463.007.050** |
| | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** | **1 jenis** | **87.534.500** |
| | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya | 150 orang | 87.534.500 |
| | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **6 jenis** | **2.220.093.350** |
| | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 kegiatan | 68.311.150 |
| | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | 120 unit | 57.533.000 |
| | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota | 600 orang | 90.355.900 |
| | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana | 10 kawasan | 141.100.000 |
| | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | 35 orang | 1.338.981.000 |
| | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 1 dokumen | 326.822.500 |
| | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | 5 kawasan | 196.989.800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Persentase penanganan tanggap darurat** | **100%** | **583.806.350** |
| | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 25 Dokumen | 180.854.500 |
| | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 orang | 58.889.350 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota | Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis | 35 orang | 99.9112.500 |
| | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 500 orang | 244.150.000 |
| | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan** | **3 jenis** | **571.572.850** |
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana | 2 dokumen | 90.037.500 |
| | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | 5 kegiatan | 435.093.350 |
| | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan bencana daerah | 2 dokumen | 46.442.000 |
| | **Total** | | | **7.763.019.642,40** |

Tabel 4.4
Proyek Strategis Daerah yang Dilaksanakan Perangkat Daerah

| No. | Proyek Startegis | Tujuan/Sasaran Daerah | Indikator Kinerja | | Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Uraian (Output) | Target | |
| | | | | | |
| | | NIHIL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabel 4.5
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

| No. | Program/Kegiatan /Sub Kegiatan | Jenis Belanja | Sasaran Penerima Manfaat | | | Sumber Pendanaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nama Objek | Jumlah | Rincian | |
| | | | | | | |
| | | NIHIL | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# BAB V

# PENUTUP

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 apabila terdapat ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
    a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan

b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

## 5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nganjuk, 2025
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

**SUTOMO, S.Sos, M.M**
Pembina Tingkat I
NIP. 19740802 199803 1 005